



RANCANGAN AKHIR RENSTRA BAKORWIL I MADIUN TAHUN 2025-2026



BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN (BAKORWIL I MADIUN)

Jl. Pahlawan No. 31 Madiun Telp. 0351-464151 Fax. 0351-457580
www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga pada saatnya Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun (Bakorwil I Madiun) dapat menyusun dokumen Renstra Tahun 2025-2026.

Dokumen Renstra ini disusun berdasarkan kerangka acuan berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2026, yang memuat 5 (lima) tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2025-2026.

Keberhasilan penyusunan dokumen Renstra Tahun 2025-2026 ini semata-mata hanya karena terwujudnya rasa kebersamaan tanggung jawab dan peran serta aktif semua unsur yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Sarana dan Prasarana serta didukung unsur staf yang ada di Bakorwil I Madiun.

Dengan disusunnya dokumen Renstra ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja Bakorwil Madiun secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
TABEL GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyesuaian	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAKORWIL I MADIUN	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bakorwil I Madiun	5
2.2 Sumber Daya Bakorwil I Madiun.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Bakorwil I Madiun	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	26
3.2 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	26
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakorwil I Madiun	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
6.1 Rencana Program Tahun 2025 – 2026.....	37
6.2 Kegiatan Kegiatan Tahun 2025 - 2026	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB VIII PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

No table of figures entries found.

TABEL GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi Bakorwil I Madiun

15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil I Madiun Tahun 2025-2026 dibuat sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 yang disusun sebagai dokumen transisi hingga penetapan Kepala Daerah baru hasil Pemilu serentak Tahun 2024. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, bahwa Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi tahun 2025-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah dan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Maka dokumen Renstra Bakorwil I Madiun tahun 2025-2026 disusun dengan tetap memperhatikan:

1. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024;
2. Isu-isu strategis yang berkembang;
3. Kebijakan Nasional;
4. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026

1.2 Dasar Hukum Penyesuaian

Dasar hukum penyesuaian penyusunan Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

- Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan.
 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor _____ Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026.

Tujuan disusunnya Renstra Tahun 2025-2026 adalah sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2026 serta pedoman pelaksanaan kegiatan evaluasi Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2025-2026 disusun dengan tata urutan penulisan sebagaimana sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, berisi tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta kelompok sasaran layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, berisi permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada Bab II serta isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi tentang tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2026 serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi

uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi tentang indikator kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2025-2026

BAB VIII PENUTUP, berisi penutup dari dokumen rencana strategis Bakorwil I Madiun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAKORWIL I MADIUN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bakorwil I Madiun

Bakorwil I Madiun adalah salah satu di antara 5 (lima) Bakorwil yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan keberadaannya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mempunyai **tugas pokok** *membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

Ditinjau dari segi kewilayahan maka keberadaan dan peran Bakorwil cukup strategis dalam membantu Gubernur Jawa Timur melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan melaksanakan program-program di wilayah Jawa Timur.

Wilayah kerja Bakorwil I Madiun meliputi 10 (sepuluh) kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur bagian barat yaitu "**Pawitan Dirogo Tunggal Diri**": 1. Kab. Pacitan, 2. Kab. Ngawi, 3. Kab. Magetan, 4. Kab. Madiun, 5. Kota Madiun, 6. Kab. Ponorogo, 7. Kabupaten Tulungagung, 8. Kabupaten Trenggalek, 9. Kab. Kediri dan 10. Kota Kediri. Luas kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil I Madiun adalah 9.776 km² (20.5% dari luas wilayah Jawa Timur) dengan penduduk kurang lebih 7.850.000 jiwa (19.9% dari jumlah penduduk Jawa Timur).

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Bakorwil I Madiun memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;

4. Pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
5. Pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
7. Penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antar pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
8. Pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
10. Pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
11. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan organisasi Bakorwil I Madiun terdiri dari seorang Kepala Bakorwil yang dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) bidang yang mempunyai fungsi yaitu:

(1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Tata Usaha;
- 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- 3. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi dan pemerintahan antar pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan

- perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
 - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
 - j. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan

Perangkat Daerah terkait; dan

- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Kepala Bidang Pemerintahan dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan yang terdiri dari: Sub Bidang Pemerintahan I; Sub Bidang Pemerintahan II.

(3) Bidang Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi dan pemerintahan antar pemerintah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/ Kota di wilayah kerjanya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan,

perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- j. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari:

1. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I;
2. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II.

(4) Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan,

- sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi dan pemerintahan antar pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
 - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga,

pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan
- j. perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- k. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Kepala Bidang Kemasyarakatan dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemasyarakatan yang terdiri dari :

1. Sub Bidang Kemasyarakatan I;
2. Sub Bidang Kemasyarakatan II.

(5) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi dan pemerintahan antar pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;

- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- j. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakorwil.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari :

1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana I;
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana II;

Untuk lebih jelasnya, berikut susunan organisasi Bakorwil I Madiun:



Gambar 1. Susunan Organisasi Bakorwil I Madiun

2.2 Sumber Daya Bakorwil I Madiun

Keadaan pegawai, sarana dan prasarana di Bakorwil I Madiun sampai pada akhir bulan Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Keadaan Pegawai

- 1) Jumlah pejabat struktural, fungsional, dan staf Bakorwil I Madiun,

a. Pejabat Struktural Eselon II	:	1	orang
b. Pejabat Struktural Eselon III	:	4	orang
c. Pejabat Struktural Eselon IV	:	11	orang
d. Pejabat Fungsional (Perencana)	:	1	orang

- | | | | |
|---------|---|-----------|-------|
| e. Staf | : | <u>37</u> | orang |
| Jumlah | : | 54 | orang |
- 2) Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan
- | | | | |
|-----------------|---|----------|--------|
| a. Golongan I | : | - | orang |
| b. Golongan II | : | 18 | orang |
| c. Golongan III | : | 30 | orang |
| d. Golongan IV | : | <u>6</u> | orang+ |
| Jumlah | : | 54 | orang |
- 3) Jumlah pegawai berdasarkan Jenis kelamin
- | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|
| a. Laki-laki | : | 36 | orang |
| b. Perempuan | : | <u>18</u> | orang + |
| Jumlah | : | 54 | orang |
- 4) Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan :
- | | | | |
|-----------------|---|----------|---------|
| a. Pascasarjana | : | 6 | orang |
| b. Sarjana | : | 26 | orang |
| c. Diploma | : | 2 | orang |
| d. SLTA | : | 19 | orang |
| e. SLTP | : | 1 | orang |
| f. SD | : | <u>-</u> | orang + |
| Jumlah | : | 54 | orang |
- 5) Jumlah PPPK berdasarkan pendidikan:
- | | | | |
|------------|---|---|-------|
| a. Sarjana | : | 1 | orang |
|------------|---|---|-------|
- 6) Jumlah PTT-PK berdasarkan pendidikan:
- | | | | |
|------------|---|---|-------|
| a. Sarjana | : | 2 | orang |
|------------|---|---|-------|

Berdasarkan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan, maka jumlah kebutuhan Pegawai Bakorwil I Madiun sebanyak 79 pegawai, sehingga keadaan pegawai masih kurang sebanyak 20 pegawai.

B. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Bakorwil I Madiun adalah sebagai berikut :

- 1) Bangunan dan tanah:

a. Tanah	:	19.289m ²	
b. Bangunan gedung kantor	:	1.930	m ²
c. Bangunan gedung Dipenda	:	455	m ²
d. Bangunan pendopo rumah dinas jabatan	:	1.344	m ²
e. Bangunan masjid kantor	:	64	m ²
f. Bangunan pos jaga dan paseban	:	37	m ²
g. Bangunan garasi	:	190	m ²
h. Bangunan rumah dinas	:	606	m ²
2) Kendaraan kantor:			
a. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih	:	15	buah
b. Kendaraan bermotor roda dua	:	18	buah
3) Mesin/peralatan perkantoran:			
a. Mesin ketik manual	:	8	unit
b. Mesin ketik elektronik	:	-	unit
c. Komputer PC	:	35	unit
d. Notebook/Laptop	:	35	unit
e. Printer	:	27	unit
f. Scanner	:	7	unit
4) Mebelair dan peralatan kantor lainnya:			
a. Almari besi / kayu	:	10	buah
b. Meja tulis / rapat	:	130	buah
c. Meja kursi tamu	:	15	buah
d. Kursi kerja / rapat	:	260	buah
e. Brankas	:	1	buah
f. Overhead projector/infra	:	3	buah
g. Mesin hitung manual	:	5	buah
h. Faximile	:	2	buah
i. Telepon	:	2	buah
5) Sarana lain - lain :			
a. AC	:	55	unit
b. Mesin Pompa Air (jet pump)	:	5	unit
c. Lemari es	:	7	buah
d. Video kamera	:	4	buah
e. TV	:	14	buah
f. Sound sistem	:	3	buah
g. Kamera Photo	:	6	buah
h. Tandon air	:	3	buah
i. Mesin pompa air	:	5	buah

2.3 Kinerja Pelayanan Bakorwil I Madiun

Pencapaian kinerja pelayanan Bakorwil I Madiun tahun 2019-2023, dapat dijelaskan dalam tabel evaluasi yang disajikan berikut ini:

Tabel 2. 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2023

N O	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -						Realisasi Capaian Tahun -					Rasio Capaian pada Tahun -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	-	-	√	-	96%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian kinerja pelayanan Bakorwil Madiun tahun 2019-2023 telah terlaksana dengan baik dan lancar melalui kegiatan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya. Namun di tahun 2020 terdapat sedikit hambatan karena adanya pandemic Covid-19 dimana terjadi *refocusing* anggaran yang menyebabkan beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2. 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3						4												(17)	(18)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	574,707,300.00	-	-	-	-	-	508,406,552.00	-	-	-	-	-	-	88.46	-	-	-	-	-		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,691,908,300.00	-	-	-	-	-	4,195,435,967.00	-	-	-	-	-	-	89.42	-	-	-	-	-		
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1,636,370,500.00	-	-	-	-	-	1,507,916,412.00	-	-	-	-	-	-	92.15	-	-	-	-	-		
4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	173,515,500.00	-	-	-	-	-	151,838,398.00	-	-	-	-	-	-	87.51	-	-	-	-	-		
5	Program Pelayanan Kesekretariat an	-	2,520,619,842	-	-	-	-	-	2,481,804,834	-	-	-	-	-	98.46	-	-	-	-	-		
6	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Penyelenggaraan EJSC	-	27,075,000.00	-	-	-	-	-	26,473,250.00	-	-	-	-	-	97.78	-	-	-	-	-		
7	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pemerintahan	610,000,000.00	263,750,000.00	-	-	-	-	599,705,737.00	260,659,557	-	-	-	-	-	98.31	98.83	-	-	-	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3						4												(17)	(18)
8	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pembangunan Ekonomi	660,000,000.00	269,412,866	-	-	-	-	629,443,449.00	263,323,720	-	-	-	-	95.37	97.74	-	-	-	-		
9	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Kemasyarakatan	660,000,000.00	159,148,031	-	-	-	-	629,416,090.00	158,971,718	-	-	-	-	95.37	99.89	-	-	-	-		
10	Program Koordinasi, Fasilitasi, dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Sarana dan Prasarana	610,000,000.00	187,455,878	-	-	-	-	595,792,263.00	187,018,878	-	-	-	-	97.67	99.66	-	-	-	-		
11	Program Pengembangan Data Informasi	327,922,400.00	21,233,500	-	-	-	-	255,785,233.00	21,077,350	-	-	-	-	78	99.26	-	-	-	-		
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewilayahan	-	-	1.261.769.500	-	-	-	-	-	1.241.526.457	-	-	-	-	-	98.4	-	-	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN						RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3						4												(17)	(18)
13	Program Pelayanan Kesekretariat an	-	-	13.490.251.500	15.432.595.000	15.816.476.000	16.945260.000	-	-	12.966.422.427	14.851.082.036	-	-	-	-	96,12%	96.32%	-	-		
14	Program Pelayanan Penghubung	-	-	-	561.920.000	1.500.000.000		-	-	--	557,498,025	-	-	-	-	-	99.21%	-	-		

Tidak ada kenaikan realisasi dari tahun anggaran 2019 dan 2020. Hal ini karena program dan kegiatan yang dilaksanakan Bakorwil I Madiun berjalan sesuai dengan perencanaan. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan menimbulkan kebijakan *refocusing* anggaran program dan kegiatan di Bakorwil I Madiun. Hal tersebut berpengaruh juga terhadap jumlah target yang telah ditetapkan di awal tahun perencanaan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bakorwil I Madiun merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berada di Kota Madiun dimana kelompok sasaran layanannya adalah masyarakat di wilayah kerja Bakorwil I Madiun yang terdiri dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri.

A. Tantangan

Jawa Timur merupakan provinsi paling timur di Pulau Jawa dengan luas wilayah 47.922 km², terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Mayoritas penduduk di Jawa Timur merupakan suku Jawa dan sama-sama berbahasa Jawa dan beberapa menggunakan bahasa Madura. Pemakaian bahasa ini juga mempengaruhi karakteristik budaya yang berbeda dari masing-masing wilayah. Ada 4 wilayah kawasan kebudayaan besar dan 6 wilayah kawasan kebudayaan kecil yang membuat karakteristik pembeda dari masyarakat Jawa Timur. Wilayah kerja Bakorwil I Madiun yang berada di bagian barat Provinsi Jawa Timur memiliki sifat dan karakteristik tersendiri yang kental dengan budaya Mataraman. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bakorwil I Madiun.

Sebagai wilayah otonomi daerah, kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil I Madiun pernah mengalami konflik wilayah perbatasan. Konflik-konflik tersebut dapat menimbulkan friksi-friksi yang tidak baik antar pemerintah kabupaten/kota yang terlibat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bakorwil mengupayakan mediasi dan fasilitasi untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan sama sekali potensi konflik tersebut. Pada tataran ini peran Bakorwil yang menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi lebih signifikan.

Hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang tidak top-down atau sistem komando menjadikan tantangan tersendiri bagi Bakorwil. Dalam pelaksanaan RPD Provinsi Jawa Timur dibutuhkan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu peran Bakorwil dalam menyelaraskan dengan dengan kabupaten/kota tersebut dengan upaya koordinasi, fasilitasi, dorongan serta kerjasama dengan

kabupaten/kota.

Persaingan antar kabupaten/kota dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, namun juga dapat menimbulkan konflik kepentingan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar kabupaten/kota dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing. Sejalan dengan isu strategis sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mengoptimalkan dukungan Kabupaten/Kota terhadap program Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu dioptimalkan upaya koordinasi dan fasilitasi, dorongan serta kerjasama dengan Kabupaten/Kota oleh Bakorwil di wilayah kerja masing-masing.

Kondisi pembangunan Kabupaten/Kota saat ini masih dihadapkan permasalahan pembangunan antara lain: (1) pemerataan pembangunan ekonomi yang belum merata yang diindikasikan dengan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan antar wilayah; dan (2) belum mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah.

Dalam kaitan ini, sinergi pembangunan daerah secara regional khususnya di wilayah Bakorwil I Madiun perlu optimalisasi dalam implementasi kegiatan fasilitasi, mediasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar- wilayah yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, mewujudkan kelestarian lingkungan, pengembangan kawasan Agropolitan Wilis, Kawasan Agropolitan Kelud, dan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan di Jawa Timur maka dibutuhkan adanya perencanaan yang mantap terutama sinergisme perencanaan antar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota sehingga tercipta perencanaan yang sinergi yang didukung oleh data-data yang akurat dan merupakan kebutuhan riil daerah. Oleh karena itu sistem perencanaan, seperti pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan kabupaten/kota dan Perangkat Daerah Provinsi, perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, antara lain melalui

pelibatan seluruh *stakeholder* Kabupaten/Kota terkait.

B. Peluang

Bakorwil memiliki kedekatan dengan kabupaten/kota dilihat dari sisi lokasi maupun hubungan emosional. Kedekatan ini akan memberi peluang lebih awal kepada Bakorwil untuk dapat memperoleh dan mengelola data yang akurat dari masing-masing Kabupaten/Kota, baik yang diperoleh pada saat koordinasi, monitoring termasuk peninjauan lapangan dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Bakorwil dengan Kabupaten/Kota. Selanjutnya akan memperkuat program Satu Data Indonesia atau Big Data yang menjadi pusat sumber data yang lebih akurat. Pada saat ini Bakorwil belum secara optimal dapat menyediakan data-data dalam konteks kewilayahan yang dapat dimanfaatkan secara internal maupun eksternal termasuk pemanfaatan oleh lingkup Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai alat kontrol, evaluasi rencana pembangunan maupun data untuk menyusun perencanaan pembangunan. Hal-hal yang dilakukan kedepan adalah Bakorwil lebih mengoptimalkan pengumpulan dan pengolahan data yang berasal dari kabupaten/kota di wilayah kerjanya yang diperoleh pada saat koordinasi, monitoring, termasuk peninjauan lapangan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan program, perlu memanfaatkan berbagai **peluang** yang ada yang berasal dari faktor eksternal Bakorwil di Jawa Timur, yaitu:

1. Adanya respon dan kepercayaan yang baik dari Pemda Kab./Kota di Wilayah Bakorwil Jawa Timur;
2. Adanya dukungan dari Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menunjang program kegiatan Bakorwil Jawa Timur;
3. Adanya kerjasama dengan Perangkat Daerah Provinsi, perguruan tinggi, pakar/praktisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra kerja koordinasi, pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bakorwil sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan maka terdapat beberapa permasalahan pembangunan dalam urusan **“Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian”** sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik	Masih ada ASN yang belum memahami mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Belum terpenuhinya semua sarana dan prasarana yang belum ada.
3	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang belum sesuai dengan tupoksinya
4	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Sumber Daya Manusia	Masih ada ASN yang kemampuannya belum sesuai dengan perkembangan teknologi.

3.2 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

A. Potensi bencana

Potensi bencana memberikan efek dan dampak terkait pertumbuhan dan investasi di wilayah Bakorwil I Madiun, sehingga perlu upaya mitigasi bencana kedalam perencanaan tata ruang.

B. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Perlu perlindungan terhadap lahan pertanian dalam rangka mempertahankan luasan lahan sawah irigasi dan non irigasi untuk menunjang kebutuhan akan pangan sehingga tidak terjadi alih fungsi pada lahan pertanian.

C. Kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Perlu keterpaduan dan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Bakorwil I Madiun melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan dimana pembangunan kawasan perkotaan menjadi distribusi hasil produksi dari wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya

D. Peran kawasan strategis di Bakorwil I Madiun.

Pemantapan peran dan fungsi Kawasan Strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan dan pemerataan wilayah di Bakorwil I Madiun diperlukan pengembangan kawasan yang meliputi:

1. **Klaster Agropolitan Wilis**

Selingkar Wilis adalah sebuah proyek pembangunan jalan lingkar yang mengelilingi Gunung Wilis dan menghubungkan enam daerah di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kediri. Proyek ini telah ditetapkan sebagai kawasan strategis dan akan mendapatkan akselerasi atau percepatan pembangunan nasional 1. Pembangunan Selingkar Wilis nantinya akan menghubungkan wilayah di sekitar Gunung Wilis yang terdiri dari 13 kabupaten/kota, dengan total penduduk mencapai hampir 10 juta jiwa. Dalam Perpres 80 tahun 2019, disebutkan berbagai program rencana pembangunan di kawasan Selingkar Wilis, mulai dari pembangunan bandara di Kediri, dan jalan tol dari Kertosono sampai ke Tulungagung. Serta, pembenahan jalan Selingkar Wilis yang panjangnya mencapai 235 Km, dan penuntasan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Selain itu, pengembangan Selingkar Wilis dilakukan dengan tujuan mewujudkan jejaring wisata pegunungan, pantai, panorama

alam dan budaya yang bersinergi dengan pengembangan agrobisnis dan industri serta pengolahan bahan mineral untuk membangkitkan daya tumbuh kembang kawasan secara inklusif dan berkelanjutan.

2. **Klaster Regional Kelud** berfungsi sebagai pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar;
3. Lintas batas daerah antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kesepakatan kerjasama antar daerah meliputi beberapa bidang pertanian, perkebunan, kesehatan, pariwisata, pendidikan, ketertiban dan keamanan, dan infrastruktur dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama antar wilayah tersebut adalah seperti KARISMAPAWIROGO (Karanganyar–Wonogiri–Sragen–Magetan–Pacitan–Ngawi - Ponorogo), PAWONSARI (Pacitan–Wonogiri-Wonosari), GOLEKPAWON (Ponorogo-Trenggalek–Pacitan-Wonogiri), NGADIPONO (Nganjuk–Madiun-Ponorogo).

Permasalahan-permasalahan tata ruang wilayah di Bakorwil I Madiun tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat agar dalam pengembangan tata ruang wilayah bisa terlaksana sesuai dengan arah, maksud dan tujuan yang telah ditentukan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat kegiatan antar wilayah, saluran irigasi baik sekunder maupun tersier, waduk, dam, embung, pasar rakyat, dan sebagainya dibutuhkan untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan pemerataan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dan peningkatan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan (perluasan penciptaan kawasan agropolitan, minapolitan dan agroindustri) terutama di sekitar kawasan Selingkar Wilis dan Kelud serta Jalur Lintas Selatan (JLS) yang merupakan jalur strategis.

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu strategis KLHS di wilayah Bakorwil I Madiun di antaranya terkait dengan pengelolaan hutan, lahan dan sumber air, permasalahan pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan, masih adanya lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan, masih adanya gangguan kawasan hutan, belum optimalnya informasi geologi dalam rangka mitigasi bencana geologi, konservasi air tanah, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air, terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan penambangan emas tanpa ijin (PETI), efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, potensi energi terbarukan cukup besar pengembangan energi panas bumi masih mengalami beberapa kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi gas bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis maka isu-isu strategis yang ada di wilayah kerja Bakorwil I Madiun adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan;
2. Kurangnya dukungan dana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bakorwil;
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur;

Isu-isu strategis di atas merupakan gambaran dari hasil monitoring, evaluasi, dan koordinasi terhadap kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil I Madiun dan menjadi prioritas Bakorwil I Madiun di tahun 2025-2026 yaitu:

“Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun.”

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakorwil I Madiun

Tujuan dan Sasaran Bakorwil I Madiun sesuai dengan RPD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Bakorwil I Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas	-	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100%	100%
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80.10	80.10
		2. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang ditindaklanjuti	100%	100%

4.2 Cascading Kinerja

Cascading kinerja Bakorwil I Madiun memuat penjabaran yang dimulai dari tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, subkegiatan, indikator subkegiatan, hingga satuan yang secara lengkap ditampilkan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4. 1 Cascading Kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Indikator Program yang tercapai; IP ASN Persentase Realisasi Anggaran 	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah 	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
								2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
								3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
								4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
								5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
								6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
								7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan
						2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan
								2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
								3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
								4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen
								5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
								6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
								7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan
								8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan
						3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
								2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
								3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Jumlah laporan data pegawai	Dokumen
								4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
						4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket
								2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket
								3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket
								4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket
								5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket
								6. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket
								7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	paket

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan
								8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
								9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
								10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
						5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
								2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
								3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
								4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
						6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit
								2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit
								3. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan
								4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit
								5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
				2. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	7. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Bidang Pemerintahan 2. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Bidang Pembangunan Ekonomi 3. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Bidang Kemasyarakatan 4. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Bidang Sarana Prasarana	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	laporan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bakorwil I Madiun selama ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain tidak dimilikinya aksesibilitas hirarki secara langsung dengan pemerintah kabupaten/kota serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan Bakorwil I Madiun dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun strategi dan kebijakan Bakorwil I Madiun adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas	-	1. Meningkatkan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	1. Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun
	2. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun	2. Meningkatkan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	2. Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan, maka untuk mencapainya harus ada langkah yang dilakukan yaitu melalui Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada setiap program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Bakorwil I Madiun.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan juga merupakan aspek operasional dari suatu Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcome* maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Renstra.

Bakorwil I Madiun telah, sedang, dan akan melaksanakan program-program sebagai berikut:

6.1 Rencana Program Tahun 2025 – 2026

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pelayanan Penghubung

6.2 Kegiatan Kegiatan Tahun 2025 - 2026

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi		
											2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH					
											target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(6)	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Madiun	5	07	X	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Indikator Program yang tercapai	persen	-	100%	16.083.105.492	100%	16.282.228.981	100%	32.365.334.473	Bakorwil Madiun	Madiun		
								2. Persentase Realisasi Anggaran	persen	-	96%		96%							
								1. Indeks Profesionalitas ASN	indeks	-	75	76	76							
		X	X	X	0	1	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	dokumen	-	10	8.053.710	10	27.818.565	20	258,191,000	Bakorwil Madiun	Madiun
										Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Laporan	-	15	15	30					
									0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	-	6	2.952.400	6	2.952.400	12	37,671,000		
									0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	1	767.200	1	767.200	2	45,804,000		
									0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	1	642.200	1	642.200	2	22,844,000		
									0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPASKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	1	767.200	1	9.000.000	2	30,471,000		
									0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	1	652.200	1	8.000.000	2	26,737,000		
0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	-	11	1.630.310	11	10.000.000	22	34,332,000											
0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	4	642.200	4	18.000.000	8	60,332,000											

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi			
									2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	14	15	16	17	18	19	20	21			
		X	X	X	0	1	0	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	laporan	-	12	13.360.171.390	12	14.859.653.500	24	56.862.406,000	Bakorwil Madiun	Madiun
					0	1	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	-	56	13.074.900.000	56	14.500.000.000	56	55.467.330,000		
					0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	-	12	277.212.000	12	315.000.000	24	1.230.600,000		
					0	3	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	-	12	2.736.000	12	10.000.000	24	34.741,000		
					0	4	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	-	12	865.900	12	6.500.000	24	23.398,000		
					0	5	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	1	853.700	1	7.403.500	2	30.307,000		
					0	6	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	1	665.700	1	5.750.000	2	21.511,000		
					0	7	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	12	2.295.890	12	7.500.000	24	27.334,000		
					0	8	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	-	1	642.200	1	7.500.000	2	27.185,000		
		X	X	X	0	1	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	-	12	534.737.720	12	125.500,000	24	460.093,000	Bakorwil Madiun	Madiun
					0	1	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	-	2	528.830.000	2	100.000.000	4	370.791,000		
					0	2	0		-		-								
					0	3	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	12	4.817.620	12	6.000.000	24	14.153,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi	
							2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	14	15	16	17	18	19	20	21	
				0 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Jumlah laporan data pegawai	Dokumen	-	12	517.200	12	12.000.000	24	24,008,000		
				0 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	12	572.900	12	13.500.000	24	51,141,000		
		X X X	0 1	0 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan	-	12	1.377.268.550	12	942,000,000	24	3,103,696,000	Bakorwil Madiun	Madiun
				0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	-	1	20.000.100	1	20.000.000	2	77,250,000		
				0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	-	1	34.726.200	1	18.500.000	2	71,410,000		
				0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	-	1	19.841.500	1	8.500.000	2	31,200,000		
				0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	-	12	-	12	5.000.000	48	17,000,000		
				0 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	--	12	15.164.000	12	45.000.000	48	152,618,000		
				0 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	-	2	10.044.000	2	10.000.000	8	25,000,000		
				0 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	paket	-	12	50.000.000	12	35.000.000	24	113,600,000		
				0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	12	1.227.492.750	12	800.000.000	48	2,615,618,000		
				1 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-						
				1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-						
		X X X	0 1	0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	-	12	1.148.318.630	12	1,137,500,000	24	4,397,024,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi		
							2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	14	15	16	17	18	19	20	21		
				0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	12	7.000.000	12	7.500.000	24	27,250,000			
				0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	12	453.460.000	12	440.000.000	24	1,673,704,000			
				0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-									
				0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	3	687.858.630	3	690.000.000	6	2,696,070,000			
		X	X	X	0 1 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	-	12	278.350.000	12	536.000,000	24	1,863,850,000	Bakorwil Madiun	Madiun
				0 1 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	-	12	51.306.000	12	40.000.000	48	158,800,000			
				0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	-	12	80.819.000	12	76.000.000	48	292,400,000			
				0 3 -	-	-	-	-	-	-	-					
				0 4 -	-	-	-	-	-	-	-					
				0 5 Pemeliharaan Mebel/	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	-	1	5.000.000	1	10.000.000	4	24,000,000			
				0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	-	12	29.225.000	12	60.000.000	48	213,750,000			
				0 7 -	-	-	-	-	-	-	-					
				0 8 -	-	-	-	-	-	-	-					
				0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	2	112.000.000	2	350.000.000	4	1,174,900,000			

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (PERENCANAAN KONDISI AWAL TAHUN 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi
									2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun				PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi	16	16	756,216,206	16	691,913,426	32	1,448,129,632	Bakorwil I Madun	Wilker Bakorwil I Madiun
					0 Pelaksanaan Pelayanan 1 Penghubung	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Bidang Pemerintahan	rekomendasi	4	4	189,054,052	4	172.978.326	8	362,032,408		
						Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Bidang Pembangunan Ekonomi	rekomendasi	4	4	189,054,052	4	691,913,426	8	362,032,408		
						Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Bidang Kemasyarakatan	rekomendasi	4	4	189,054,050	4	691,913,427	8	362,032,408		
						Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan - Bidang Sarana Prasarana	rekomendasi	4	4	189,054,050	4	691,913,427	8	362,032,408		
					0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 1 Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	laporan	48	48	756,216,206	48	691,913,426	96	1,448,129,632		

Sementara itu program dan kegiatan Bakorwil I Madiun Tahun 2025-2026 yang masuk dalam program prioritas Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Program Ikon Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Provinsi	Indikator	Target		Program Nomenklatur
			2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Milenial Job Center (MJC)	Jumlah Penerima Asistensi MJC	150 orang	150 orang	Program Pelayanan Penghubung
	Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lokasi Pelaksanaan	Wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Program Pelayanan Penghubung

Tabel 6. 3 Program Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Icon	Bentuk Kegiatan	Program Nomenklatur
(1)	(2)	(3)	(4)
Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	Kegiatan bersama UPT dan Cabang Dinas se-Wilayah kerja Bakorwil I Madiun untuk memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur	Program Pelayanan Penghubung
	Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kesiapan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak	Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kesiapan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Program Pelayanan Penghubung
	Kegiatan Mataram Festival – Bakowil I Madiun	Kegiatan seni budaya Mataraman dengan menampilkan budaya, produk unggulan, UMKM se-wilayah kerja Bakorwil I Madiun yang diselenggarakan di halaman Rumah Dinas Kepala Bakorwil Madiun	Program Pelayanan Penghubung

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bakorwil I Madiun mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Jawa Timur Tahun 2025-2026 sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas	-	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	100%	100%
		Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang ditindaklanjuti	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2025-2026 merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam RPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 dengan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan dengan dan telah memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ kendala yang dihadapi organisasi.

Dokumen Renstra ini juga merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakorwil I Madiun serta sebagai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra.

Akhirnya sebagai kelanjutan penjabaran Renstra Bakorwil I Madiun akan disusun rencana kegiatan/aksi (*action plan*) tahunan pada tahun-tahun berikutnya, dengan harapan bersama semoga dalam pelaksanaan tugas dapat memperoleh hasil yang optimal.

Madiun, Desember 2023
KEPALA BAKORWIL I MADIUN



R. HARU WAHONO SANTOSO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670221 198809 1 001